

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan keadaan pada saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat berlindung, kesehatan, pendidikan, pakaian dan makanan. Kemiskinan juga merupakan masalah yang global disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pendidikan maupun pekerjaan. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan dan papan. Dengan demikian, dampak dari rendahnya pendapatan ialah kurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Terdapat pula pengukuran kemiskinan yang di kelompokkan dalam dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut lebih mengacu pada satu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat atau negara. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi akibat kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Permasalahan kemiskinan sangatlah kompleks dan tidak bisa dipahami dengan menggunakan satu dimensi atau indikator sehingga diperlukan indikator

dan ukuran yang multidimensi, indikator yang banyak digunakan yaitu indikator global dengan menggunakan pendekatan moneter seperti garis kemiskinan yang digunakan oleh Bank Dunia pada tahun 2015. Sementara itu, ada tiga indikator yang digunakan untuk memahami di dalam permasalahan kemiskinan, yaitu kesehatan, pendidikan dan standar kualitas hidup. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pendekatan moneter dan konsumsi tidak cukup untuk memberikan pandangan yang jelas tentang kemiskinan, maka dibutuhkan pula ketiga indikator diatas.

Berdasarkan sumber data dari (tribunnews.com2019), masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal yang menghambat proses pembangunan suatu negara. Kemiskinan paling parah terjadi di negara-negara berkembang. Salah satunya yaitu di negara Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo angka kemiskinan di Indonesia terus menurun. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan dari 11,22% pada Maret 2015, menjadi 9,41% pada Maret 2019. Selain angka kemiskinan, telah terjadi penurunan di angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Angka pengangguran menurun dari 5,81% pada Februari 2015, menjadi 5,01% pada Februari 2019. Sedangkan, ketimpangan turun karena Rasio Gini (tingkat ketimpangan) mengecil dari 0,408 pada Maret 2015, menjadi 0,382 pada Maret 2019. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dari 4,88% pada 2015, menjadi 5,17% pada 2018 dan terakhir Semester I-2019 mencapai 5,06%. Sementara itu, target penurunan kemiskinan pada tahun 2020

menjadi 9,0% dan gini rasio 0,375. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, pada Maret 2019 angka kemiskinan turun yaitu 9,41% dari 9,48% pada September 2018. Sedangkan, gini rasio (tingkat ketimpangan) juga menurun dari 0,384 menjadi 0,382 atau menurun 0,002 poin. Nominal rata-rata buruh tani per hari pada Mei 2019 naik hingga 2,29% bila dibandingkan dengan September 2018, dari Rp. 52.665,- menjadi Rp. 53.873,-. Dalam upah riil buruh tani per hari pada Maret 2019 naik 0,93% bila dibandingkan September 2018. Jika dibandingkan dengan Maret 2018, nilai nominal maupun riil upah buruh tani mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 4,41% dan 2,25%. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, pada September 2018 sampai Maret 2019 tingkat inflasi umum ialah 1,53%. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 juga mengalami penurunan sebesar 800.000 orang bila dibandingkan dengan Maret 2018. Jumlahnya menurun mencapai 0,41%.

Garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 adalah Rp. 425.250,- per kapita atau per bulan. Garis kemiskinan Indonesia meningkat 3,55% dari garis kemiskinan September 2018 yang sebesar Rp. 410.670,-. Garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2019 naik 5,99% bila dibandingkan dengan Maret 2018 yang berjumlah Rp.401.220,-. Apabila rata-rata satu rumah tangga di Indonesia memiliki empat sampai lima anggota keluarga, maka garis kemiskinan rata-rata secara nasional menjadi Rp.1.990.170,- per rumah tangga per bulan. Apabila ada satu rumah tangga memiliki pendapatan dibawah angka tersebut, maka tergolong miskin. Penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 mencapai 6,89% akan tetapi menurun menjadi 6,69% pada Maret 2019. Penduduk miskin di

daerah pedesaan juga mengalami penurunan. Dari 13,10% pada September 2018 menjadi 12,85% pada Maret 2019. Penduduk miskin di perkotaan menurun sebanyak 393.400 orang dan jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019. Daerah DKI Jakarta merupakan provinsi yang mempunyai garis kemiskinan tertinggi. Angka garis kemiskinan DKI Jakarta yaitu Rp. 637.260,- per kapita per bulan setara dengan pendapatan per rumah tangga sebesar Rp. 3.358.360,- per bulan dengan anggota keluarga yang berjumlah empat sampai lima orang.

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin terdapat beberapa kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
2. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan;
3. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Karakteristik dari Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga merupakan pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih dan pangan. Program tersebut juga mencakup Raskin, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bea Siswa Sekolah Mandiri. Selain itu, Program Berbasis Pemberdayaan menggunakan pendekatan partisipatif, perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, mendorong penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pengelolaan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat. Dari program ini yang menerima

manfaatnya yaitu kelompok masyarakat yang tergolong miskin. Yang masuk kategori program ini ialah PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil memiliki tujuan yaitu untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Program ini memiliki beberapa karakteristik yaitu bantuan modal skala mikro, peningkatan ketrampilan serta manajemen usaha, penguatan kemandirian atau akses pasar dan yang menerima manfaat dari program ini adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan dapat ditunjukkan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki usaha dan terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan mempunyai dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin rinciannya terdiri dari: (a) pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat (2), pasal 28 (H) ayat (1) dan ayat (2), pasal 33 ayat (3) dan (4) dan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Kota Cirebon merupakan salah satu kota yang mengimplementasikan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan

di Kota Cirebon. Menurut data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kota Cirebon, jumlah penduduk fakir miskin meningkat dari 27.252 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2015 menjadi 27.881 pada tahun 2018. Angka kemiskinan di Kota Cirebon meningkat lagi dari 27.881 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2018 menjadi 28.383 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2019, dengan rincian angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Cirebon meliputi 5 (lima) Kecamatan diantaranya adalah (1) Kecamatan Pekalipan 4.556 Kepala Keluarga (KK), (2) Kecamatan Lemah Wungkuk 8.957 Kepala Keluarga (KK), (3) Kecamatan Kejaksan 5.485 Kepala Keluarga (KK), (4) Kecamatan Kesambi 7.074 Kepala Keluarga (KK) dan (5) Kecamatan Harjamukti 12.922 Kepala Keluarga (KK).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon garis kemiskinan Kota Cirebon pada Maret 2019 sebesar Rp. 444.574,- per kapita per bulan dan pada Maret 2018 Rp. 426.738,-. Selama periode Maret 2018 hingga Maret 2019 terjadi kenaikan sebesar 17.836,- per kapita per bulan atau naik 4,18%. Indeks kedalaman kemiskinan (P2) Kota Cirebon terjadi kenaikan dari 0,99 pada Maret 2018 menjadi 1,23 pada Maret 2019. Hal ini menandakan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Sedangkan, Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Cirebon terjadi kenaikan 0,19 pada Maret 2018 menjadi 0,26 pada Maret 2019. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan (GAP) pengeluaran antara penduduk miskin itu sendiri semakin besar. Sebenarnya, telah banyak program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sudah diimplementasikan di Kota Cirebon

diantaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Kelurga Sejahtera (KKS) , Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan BPNT atau Kartu Kelurga Sejahtera (KKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Alat Bantu untuk penyandang disabilitas dan lain-lain.

Kecamatan Harjamukti merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kota Cirebon sebesar 9.207 Kepala Keluarga (KK). Menurut data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kecamatan Harjamukti adalah 12.922. Jumlah peningkatan kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Harjamukti merupakan masalah kompleks tentang kesejahteraan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan yaitu tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, pendidikan, kesehatan, akses terhadap barang atau jasa, gender, lokasi lingkungan dan geografis.

Berdasarkan peninjauan sementara diketahui bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon belum optimal, sebagaimana terlihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sudah direalisasikan namun tujuan belum tercapai secara maksimal;
2. Pelaksanaan program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon belum merata;
3. Sumber pendanaan terbatas sedangkan sumber daya manusia (masyarakat) di Kecamatan Harjamukti masih kurang baik dikarenakan masyarakat

masih bersifat pragmatis dan ingin selalu di beri (gratis). Selain itu, masyarakat belum sadar dalam melakukan upaya perbaikan ekonomi dan ingin memiliki wirausaha sendiri atau mandiri;

4. Sarana dan prasarana dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kurang memadai;
5. Kurangnya kedisiplinan dari para pelaksana kebijakan;
6. Kondisi ekonomi, sosial dan politik masih kurang baik;

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari masalah kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yaitu :

1. Menambah pengangguran, karena yang bersangkutan tidak memperoleh penghasilan;
2. Banyak menimbulkan konflik rumah tangga,
3. Sulit memperoleh pendidikan dan
4. Memicu tindak kriminal, karena masyarakat miskin akan cenderung menghalalkan segala cara.
5. Menimbulkan kecemburuan sosial, dikarenakan pemberian bantuan sosial belum merata.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk menulis tentang **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan dalam latar belakang permasalahan diatas, maka identifikasi yang akan dikaji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ?
3. Apa upaya- yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan memperkaya kajian dalam bidang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan serta untuk melihat relevan teori-teori yang telah dipelajari dengan kenyataan yang ada dilapangan.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon khusus nya di Kecamatan Harjamukti.

1.6. Kerangka Pemikiran

Menurut Budi Winarno dalam bukunya berjudul Kebijakan Publik (2014:147-148), bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas sebagai berikut :

“tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output) maupun sebagai suatu dampak (outcome)”.

Sementara itu, Grindle dalam buku Winarno (2014:149) juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa :

“secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dimana sarana-sarana tertentu di rancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan”.

Sedangkan menurut Van Metter dan Varn Horn dalam buku Winarno (2014:149) bahwa implementasi kebijakan adalah :

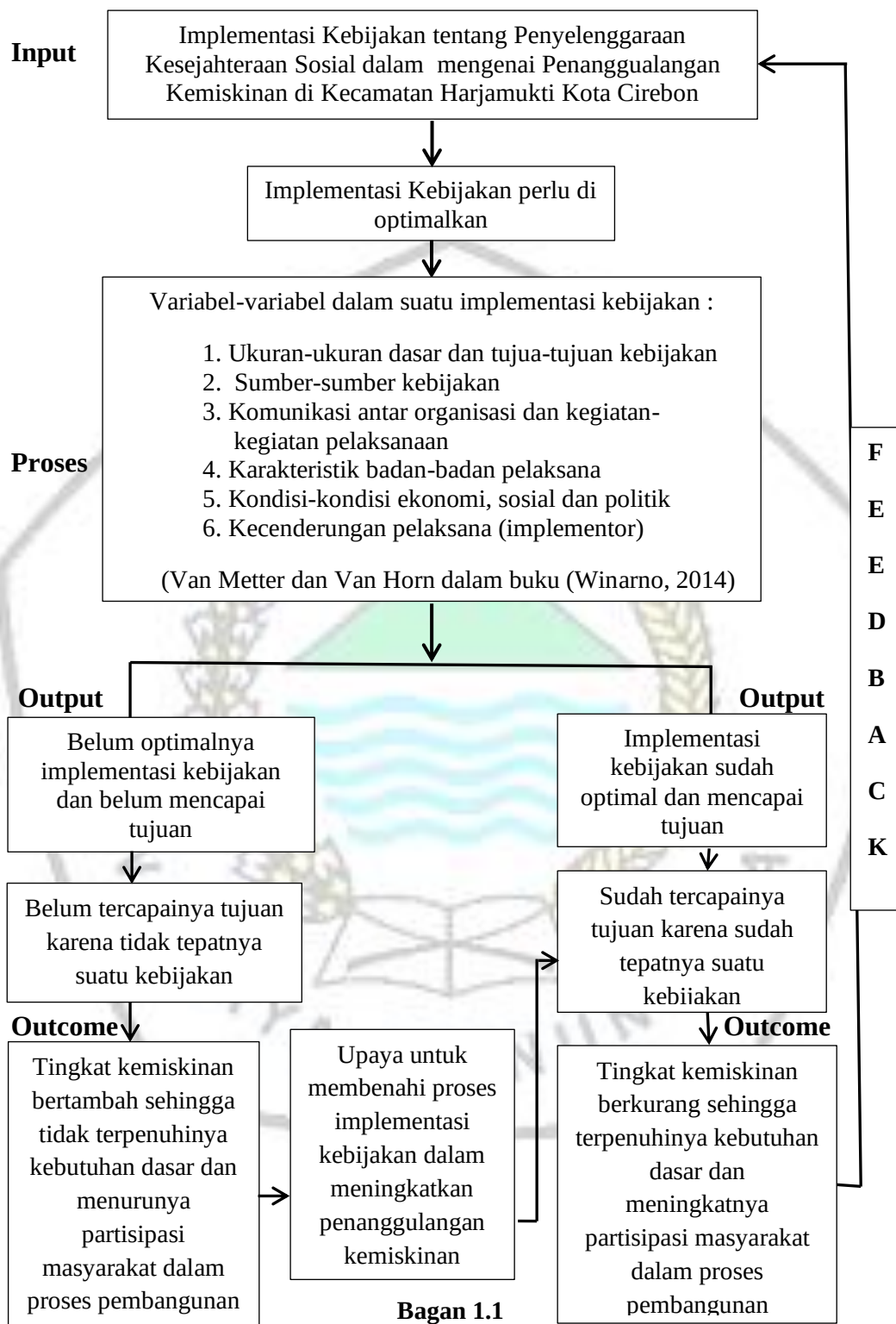
“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang di rumuskan oleh Van Metter dan Van Horn dalam buku Winarno yang berjudul Kebijakan Publik (2014:159-168). Model ini menjelaskan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan;
2. Sumber-Sumber Kebijakan;
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan;
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana;
5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik;
6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*).

Berdasarkan teori menurut Van Metter dan Varn Horn dalam buku Winarno berjudul Kebijakan Publik (2014:159-168) di atas, maka Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon apabila dilaksanakan secara optimal, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti **Gambar 1.1** dibawah ini :



Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran

1.7. Definisi dan Operasionalisasi Konsep Penelitian

1.7.1. Definisi Konsep Penelitian

Agar dapat menemukan batasan masalah yang lebih jelas, penulis dapat menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan konsep-konsep penelitian antara lain :

1. Implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan (Suaib 2016:81). Implementasi yang di maksud dalam penelitian ini adalah penerapan aturan yang lebih difokuskan lagi sebagai kebijakan pemerintah. Implementasi juga bertujuan untuk mencapai dan mengukur sampai sejauh mana tingkat keberhasilan aturan atau program pemerintah tersebut berjalan dalam hal ini kebijakan pemerintah.
2. Kebijakan merupakan segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mutlak dan wajib dilaksanakan dengan persetujuan sebagai aturan atau landasan hukum. Kebijakan pemerintah daerah adalah segala peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan.
3. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
4. Kemiskinan yaitu kondisi yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususya dari aspek konsumsi dan pendapatan.

1.7.2. Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasional konsep yang dimaksud dalam penelitian dan mengacu pada tujuan dan kerangka konsep penelitian, maka penulis menyusun definisi parameter konsep penelitian dengan model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Metter dan Van Horn dalam buku Winarno yang berjudul Kebijakan Publik (2014:159-168), ada 6 (enam) yang dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan;
2. Sumber-Sumber Kebijakan;
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan;
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana;
5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik;
6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*).

Untuk memudahkan penelitian, penulis menjelaskan operasional konsep dalam bentuk **Tabel 1.1** di bawah ini :

Tabel 1.1
Operasional Konsep Penelitian

Konsep	Dimensi	Parameter
Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2014:159-168)	Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan-tujuan kebijakan	1. Kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan sudah direalisasikan dan sudah mencapai tujuan 2. Pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan
	Sumber-sumber kebijakan	1. Stimulan (perangsang) berupa dana/anggaran 2. Sumber daya manusia
	Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	1. Koordinasi antar Instansi terkait 2. Pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan 3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
	Karakteristik badan-badan pelaksana	1. Skill atau kemampuan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program kebijakan 2. Disiplin para pelaksana

		kebijakan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan
	Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik	1. Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 2. Kondisi sosial dan politik masyarakat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon 3. Faktor pendukung dan faktor penghambat
	Kecenderungan pelaksanaan	1. Motivasi para pelaksana kebijakan kepada masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sudah dilaksanakan 2. Komitmen para pelaksana kebijakan 3. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam kelancaran atau keberhasilan dalam kegiatan penelitian dengan menggunakan

metode penelitian yang tepat. Maka permasalahan penelitian dapat terjawab dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan gambaran-gambaran, karena penulis hanya ingin menggambarkan situasi, kondisi dan peristiwa yang menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:9) dijelaskan penelitian kualitatif yaitu :

“metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.

Sedangkan, menurut Moleong (2011:6) metode penelitian kualitatif dijelaskan sebagai berikut :

“penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perihal persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khususnya yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.

1.8.2. Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh penulis yaitu teknik Purposive Sampling yang artinya pengambil sampel atau informan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik ini juga peneliti memilih dan menetapkan

beberapa informan yang dinilai berkompeten dan memahami benar-benar masalah yang diteliti.

Sampel atau informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tergantung kebutuhan dan kedalaman penelitian. Penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan, ialah informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci yaitu orang-orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti. Sedangkan, informan pendukung adalah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang di perlukan dalam penelitian. Disamping itu, pemanfaatan informan bagi peneliti yaitu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran dan membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subjek lainnya.

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Informan kunci (key informan) ialah informasi yang didapat langsung dari narasumber atau obyek yang diteliti, yaitu :
 - 1) Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon;
 - 2) Camat Kecamatan Harjamukti.
- b. Informan pendukung merupakan informan yang didapat dari :

- 1) Beberapa Kepala Bagian dan Pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon;
- 2) Beberapa Kepala Bagian dan Pegawai-pegawai di lingkungan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
- 3) Masyarakat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Sugiyono (2012:225) berpendapat bahwa :

“dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi”.

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui wawancara, pengamatan, analisis, dokumentasi dan sebagainya.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi :

1. Studi Kepustakaan atau Literatur

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur buku-buku, arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, surat kabar dan sumber-sumber tertulis yang

berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk diperlukan penulis sebagai bahan referensi dan acuan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dua teknik yaitu :

a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti.

b. Wawancara atau *interview*

Teknik pengumpulan data merupakan teknik dengan cara mengadakan tanya jawab dan bertatap langsung dengan pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data, pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung kepada Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Camat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Beberapa Kepala Bagian dan Pegawai-pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Beberapa Kepala Bagian dan Pegawai-pegawai di lingkungan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dan Masyarakat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang

akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Secara umum dokumentasi yaitu suatu pencarian, penyelidikan, penguasaan, pengawetan, pengumpulan, pemakaian dan penyediaan dokumen.

1.8.4. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data harus dibuktikan kebenarannya dalam penelitian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moleong (2011:330) mengatakan teknik triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2014), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi : (1) validitas internal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran , (2) validitas eksternal (*transferability*) pada aspek penerapannya, (3) reliabilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi dan (4) obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis.

Melalui teknik pengujian keabsahan data, alasan penulis menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan berbagai data (sumber, metode dan teori) yang diperoleh dengan cara *check re check* dan *cross check* terhadap data tersebut.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif, ialah suatu penulisan yang menggambarkan keadaan sebenarnya objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Kemudian data tersebut dianalisis dan interpretasikan serta dibantu dengan keterangan tambahan yang dapat mendukung penelitian. Maka, penelitian ini dapat menggambarkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam teknik analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam teknik analisis data yaitu :

1. Data Kondensasi (*Condensation*),

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakan atau menstransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifications*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan, pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “vinal” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

1.9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sebagai induk organisasi atau instansi resmi. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Adanya masalah yang ditemukan yaitu tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon;
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh;
3. Letak lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh penulis dalam proses penyusunan Skripsi.

1.9.2. Jadwal Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 4 bulan, yang dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2020.

Jadwal penelitian bisa dilihat melalui **Tabel 1.2** sebagai berikut :



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]